

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kepemimpinan menurut Nawawi adalah kemampuan atau kecerdasan mendorong sejumlah orang (dua orang atau lebih) agar bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terarah pada tujuan bersama. Sedangkan menurut Kartono kepemimpinan adalah kemampuan untuk memberikan pengaruh yang konstruktif kepada orang lain, untuk melakukan satu usaha kooperatif agar mencapai tujuan yang sudah direncanakan.<sup>1</sup> Dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah cara atau teknik yang digunakan pemimpin dalam memengaruhi pengikut atau bawahannya untuk melakukan kerjasama mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Apabila kepemimpinan dikaitkan dengan politik, maka kepemimpinan politik adalah kepemimpinan yang berlangsung dalam suprastruktur politik maupun dalam infrastruktur politik.<sup>2</sup> Berdasarkan konsep kepemimpinan yang telah dijabarkan sebelumnya, tidak ada konsep yang mengatakan bahwa pemimpin adalah laki-laki atau melihat gender, namun kepemimpinan melihat kemampuan seorang menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan. Tapi masih banyak masyarakat maupun lembaga berpikiran bahwa yang pantas menjadi pemimpin adalah laki-laki. Sehingga masyarakat maupun suatu lembaga enggan memberikan peran utama kepada perempuan.

---

<sup>1</sup> Pasalong, Harbani. 2008. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: Alfabeta. hlm 4-5

<sup>2</sup> R Haris Permana Sugiarto. 2019. *Gaya Kepemimpinan Politik Elly Thrisdayanti Ketua DPRD Kota Padang. Skripsi*. Padang: FISIP Universitas Andalas.

Berbicara mengenai posisi perempuan dalam kepemimpinan, perempuan selalu menjadi minoritas dalam posisi memimpin, seperti di lembaga legislatif. Dalam lembaga perwakilan tersebut hanya sedikit perempuan yang mendapatkan peran utama dalam struktur lembaga legislatif. Selain itu jumlah perempuan di legislatif baik tingkat pusat maupun daerah tidak pernah mencapai 30% sampai saat ini, meskipun sudah ada kebijakan *affirmative action* yang diberlakukan sejak tahun 2004. Rendahnya angka keterwakilan perempuan dalam parlemen membuat posisi tawar perempuan lemah dalam setiap proses pengambilan keputusan.<sup>3</sup>

Pada hal dilihat dari komposisi penduduk di Indonesia, jumlah laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda, dimana jumlah laki-laki sebanyak 135.821.768 dan perempuan sebanyak 132.761.248. Namun di antara 514 kabupaten/kota terdapat 418 kabupaten/kota memiliki jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki.<sup>4</sup> Disayangkan adalah jumlah perempuan yang terpilih di lembaga legislatif tidak sampai 30%. Contohnya di Kabupaten Padang Pariaman, memiliki jumlah penduduk perempuan jauh lebih besar dibandingkan laki-laki, tetapi pada pemilihan legislatif 2019 tidak satupun perempuan yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat belum percaya kepada perempuan menjadi pemimpin terutama dalam lembaga legislatif. Fenomena ini terjadi tentu disebabkan oleh berbagai faktor.

---

<sup>3</sup>Aisah Putri Budiatri. 2011. Bayang-Bayang Afiriasi Keterwakilan Politik Perempuan di Parlemen Indonesia. *Jurnal Studi Politik Departemen Ilmu Politik*. 1(2): 97-113.

<sup>4</sup>Safir Makki. 2020. Kemendagri: Penduduk Indonesia 268 Juta, Lebih Banyak Pria. <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200813101754-20-535205/kemendagri-penduduk-indonesia-268-juta-lebih-banyak-pria>. (diakses tanggal 19 Oktober 2020).

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen yaitu: a) Budaya patriarki yang berarti, struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral dan segalanya. Sistem patriarki yang mendominasi kebudayaan masyarakat menyebabkan adanya kesenjangan dan ketidakadilan gender yang memengaruhi hingga berbagai aspek kegiatan manusia.; b) Adat dan agama yang membatasi perempuan terlibat jauh dalam ranah dunia publik, termasuk dalam parlemen; c) Kurangnya pengalaman perempuan, biasanya perempuan dipaksa hanya terlibat dalam jabatan yang feminim, sehingga sulit bagi perempuan masuk dalam ranah politik formal.<sup>5</sup>

Keterwakilan perempuan di parlemen dinilai penting, karena perempuan yang hadir di parlemen akan membawa perubahan pada institusi yang dominan dengan laki-laki tersebut. Menurut Azza Karam dan Joni Lovenduski meyakini bahwa perempuan akan melakukan perubahan dalam empat bidang, meliputi institusional/prosedural, representasi, pengaruh terhadap *output* dan diskursus. Hal ini telah dibuktikan di Negara Swedia, dimana kehadiran perempuan di parlemen telah membawa perubahan kepada institusi yang lebih menjadi sensitif terhadap gender. Namun disayangkan di Indonesia jumlah keterwakilan perempuan di parlemen masih sedikit, karena perempuan menganggap politik adalah domainnya laki-laki.<sup>6</sup>

Minoritasnya perempuan menjadi pimpinan, disebabkan menjadi pemimpin memiliki tantangan yang besar. Menurut Kouzes dan Posner dalam buku “*Leadership Challenge*”, terdapat lima praktik dalam kepemimpinan yang

---

<sup>5</sup>Yembise, Yohana Susana, *Op Cit.*, hlm. 31-32.

<sup>6</sup>Aisah Putri Budiatri, *loc.cit*

dianggap sebagai tantangan menjadi pemimpin. Pertama, seorang dapat mengetahui bagaimana seharusnya mereka memperlakukan orang-orang di sekitarnya dan bagaimana untuk mencapai tujuan. Kedua, seorang pemimpin harus dapat menginspirasi para bawahannya dengan menyebarkan visi yang jelas. Ketiga, pemimpin tidak harus terpaku pada satu cara untuk mengejar tujuan organisasi, tetapi harus lebih inovatif. Keempat, seorang pemimpin harus dapat mendorong para bawahannya untuk bergerak agar dapat menjalankan tugasnya masing-masing. Kelima, bagaimana seorang pemimpin meyakinkan bawahannya untuk melakukan yang terbaik.<sup>7</sup>

Tantangan menjadi pemimpin ini timbul karena seorang pemimpin memiliki fungsi yang besar. Pemimpin yang mampu menjalankan fungsinya dengan benar, maka akan mengantarkan kesuksesan bagi lembaga maupun organisasi yang dipimpin. Setiap pemimpin tentu memiliki cara yang berbeda untuk menjalankan fungsi kepemimpinannya, maka dari itu menarik membicarakan cara seorang pemimpin menjalankan fungsi kepemimpinannya yang dikaitkan dengan perempuan. Berbicara mengenai fungsi kepemimpinan, banyak ahli merumuskan tentang fungsi kepemimpinan, seperti menurut Stoner, John Adair, dan Veithzal Rivai.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Indra Dwi Putranto dan Mirwan Surya Perdhana. 2018. Kepemimpinan Berdasarkan Gender: Efektifitas & Tantangan (Studi Kasus pada Kelurahan Mugassari dan Kecamatan Tembalang). *Diponegoro Journal Of Management*. 7(4): 1-11.

<sup>8</sup> Menurut Stoner ada dua fungsi kepemimpinan yaitu fungsi administrasi dan top management. Menurut Adair terdapat 6 (enam) fungsi kepemimpinan yaitu 1) perencanaan, 2) pempraksaan, 3) pengendalian, 4) pendukung, 5) penginformasian, 6) pengevaluasian. Menurut Veithzal Rivai terdapat 9 (sembilan) fungsi kepemimpinan yaitu 1) menciptakan visi dan rasa komunitas, 2) membantu mengembangkan komitmen dari pada sekedar memenuhinya, 3) mengisprasi kepercayaan, mengintegrasikan pandangan yang berlainan, 4) mendukung pembicaraan yang cakap melalui dialog, 5) membantu menggunakan pengaruh mereka, 6) memfasilitas, 7) memberi

Namun dari beberapa ahli yang merumuskan fungsi kepemimpinan tersebut, terdapat fungsi kepemimpinan menarik menurut Sondang P.Siagian. Fungsi yang dirumuskan oleh Sondang P.Siagian lebih bersifat umum dan relevan terhadap berbagai lembaga maupun organisasi. Artinya fungsi kepemimpinan yang dirumuskan oleh Sondang P.Siagian merupakan fungsi kepemimpinan yang sudah mencakup semuanya dan harus dijalankan setiap pemimpin baik dalam suatu organisasi maupun di lembaga politik sehingga disebut sebagai fungsi kepemimpinan yang hakiki. Fungsi Kepemimpinan Sondang Siagian ini cocok untuk dijadikan suatu indikator untuk menjelaskan kemampuan seorang pemimpin menjalankan fungsinya dalam suatu penelitian.

Menurut Sondang P.Siagian, terdapat lima fungsi kepemimpinan yaitu: Pertama, pimpinan sebagai penentu arah untuk mencapai tujuan. Kedua, wakil dan juru bicara dalam hubungan dengan pihak luar. Ketiga, pimpinan sebagai komunikator yang efektif. Keempat, mediator yang andal khususnya hubungan ke dalam, terutama dalam menangani situasi konflik. Terakhir kelima, pimpinan selaku integrator yang efektif, rasional, objektif, dan netral. Baik pemimpin laki-laki dan perempuan dituntut untuk menjalankan fungsi kepemimpinan ini, tentu dalam menjalankannya membutuhkan kemampuan yang memadai.<sup>9</sup>

Besarnya peranan, dan fungsi menjadi seorang pemimpin membuat perempuan menjadi minoritas dan sering hanya mendapatkan peran figuran saja. Hal ini dikarenakan adanya *stereotip* yang muncul terhadap perempuan, yang bersifat merugikan perempuan dan mempersulit perempuan untuk menjadi

---

semangat pada yang lain, 8) menopang tim, dan 9) bertindak sebagai model. Pasalong Harbani. 2008. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: Alfabeta. hlm. 22.

<sup>9</sup>Siagian, Sondang P. 2019. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 47.

pemimpin puncak, khususnya dalam politik. Sehingga perempuan yang menjadi pemimpin, harus membuktikan dirinya lebih kompeten dibandingkan laki-laki, karena perempuan menjadi pemimpin harus berusaha lebih keras agar bisa berada di atas laki-laki untuk menghancurkan *stereotip* yang melekat. *Stereotip* ini menjadi hambatan yang tidak terlihat yang mencegah perempuan untuk naik ke posisi kepemimpinan yang disebut dengan langit-langit kaca (*glass ceiling*).<sup>10</sup>

Menarik membicarakan kepemimpinan yang dikaitkan dengan perempuan khususnya di bidang politik. Hal ini disebabkan di bidang politik tersebut, masih terjadi ketimpangan kepemimpinan, khususnya di lembaga legislatif. Pentingnya kehadiran perempuan di lembaga legislatif, dibuatlah kebijakan *affirmative action* sejak tahun 2004. Namun kebijakan tersebut sampai sekarang tidak membuahkan hasil yang maksimal baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Selain itu perempuan yang mendapatkan kursi di lembaga legislatif, jarang mendapatkan posisi tinggi dalam struktur legislatif.

Terdapat beberapa penelitian tentang kepemimpinan perempuan. Seperti penelitian dari Holilah yang berjudul Fungsi dan Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan di Desa Masaran Banyuates Sampang. Dalam penelitian ini menjelaskan kepala desa perempuan hanya bisa melaksanakan fungsi kepemimpinan dibagian administrasi dengan gaya kepemimpinan *laissezfaire*. Selanjutnya penelitian dari Akbar Karim yang berjudul Kepemimpinan Nagari Perempuan (Female Leadership) di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diateh Kabupaten Solok Periode 2014-2020. Penelitian ini menjelaskan gaya

---

<sup>10</sup>North, Peter G. 2018. *Kepemimpinan (Teori dan Praktik)*. Jakarta: PT Indeks. hlm. 333.

kepemimpinan nagari perempuan yang menggunakan kepemimpinan situasional dan juga menjelaskan kepemimpinan perempuan lebih bersifat demokratis dibandingkan laki-laki. Selain itu terdapat penelitian dari R. Haris Permana Sugiarto yang berjudul Gaya Kepemimpinan Politik Elly Thrisdayanti sebagai Ketua DPRD Kota Padang. Dalam penelitian ini menjelaskan Elly Thrisdayanti mampu menjalankan kepemimpinan politik sebagai Ketua DPRD Kota Padang.

Namun terdapat yang luput dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti di atas karena lebih fokus membahas tentang gaya kepemimpinan perempuan dan lebih banyak membahas pada lembaga yang bersifat birokrasi. Maka perlu penjelasan mengenai kepemimpinan perempuan di bidang politik, seperti di legislatif yang bersifat kolektif kolegial dan lebih fokus membahas mengenai kemampuan perempuan menjalankan fungsi kepemimpinan khususnya di lembaga legislatif karena kepemimpinan pada lembaga tersebut tidak bisa disamakan dengan kepemimpinan di bidang birokrasi.

Dengan demikian dalam penelitian ini peneliti mengkaji tentang kepemimpinan perempuan di bidang politik, khususnya pada lembaga legislatif. Mengingat pada lembaga legislatif memiliki cara kepemimpinan yang berbeda. Selain itu meskipun sudah ada *affirmative action* namun jumlah perempuan yang mendapatkan kursi di lembaga legislatif tidak pernah tercapai 30%, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sehingga sampai sekarang anggota legislatif masih di dominasi oleh laki-laki, maka dari itu perlu untuk mengetahui bagaimana perempuan memimpin di tengah dominasi laki-laki. Fokus penelitian ini membahas fungsi kepemimpinan politik perempuan yang dilihat dari fenomena

menarik, yaitu Fitri Nora sebagai Ketua DPRD Kota Pariaman periode 2019-2024 dan satu-satunya perempuan di DPRD Kota Pariaman. Dalam penelitian ini menggunakan fungsi kepemimpinan yang relevan dengan fenomena yaitu menggunakan fungsi kepemimpinan menurut Sondang P.Siagian

## 1.2 Perumusan Masalah

Berbicara mengenai kepemimpinan politik oleh perempuan, khusus dalam lembaga legislatif, dimana perempuan menjadi minoritas dan sering mendapatkan peran figuran dalam legislatif. Namun pada pemilihan umum (pemilu) serentak yang dilaksanakan pada tanggal 17 April tahun 2019 terdapat fenomena yang menarik. Berdasarkan hasil pemilu tahun 2019 di Kota Pariaman hanya satu perempuan yang berhasil mendapatkan kursi di DPRD Kota Pariaman yaitu Fitri Nora yang berasal dari Partai Gerindra. Dalam dua kali periode pemilu legislatif yaitu pada tahun 2014-2019 dan 2019-2024 hanya satu perempuan yang berhasil mendapatkan kursi di DPRD Kota Pariaman dengan perempuan yang sama yaitu Fitri Nora.

**Tabel 1.1**  
**Daftar Anggota DPRD Kota Pariaman Periode 2019-2024**

Nama Anggota DPRD Kota Pariaman	Jumlah	Partai Pengusung	Daerah Pemilihan
<b>1. Fitri Nora</b>	<b>1.187</b>	<b>Partai Gerindra</b>	<b>Pariaman III</b>
2. Hamdani	1.101	Partai Gerindra	Pariaman I
3. Life Iswer	866	Partai Golkar	Pariaman I
4. Iskandar	631	Partai Nasdem	Pariaman I
5. Aris Munandar	903	PKS	Pariaman I
6. Ikhwan Idham	762	PPP	Pariaman I
7. Gusferi Akmal	723	PAN	Pariaman I
8. Fadhly	1.149	PBB	Pariaman I
9. Agus Bulyandi	1.085	Partai Gerindra	Pariaman II
10. Faisal	743	Partai Golkar	Pariaman II
11. Jonasri	854	Partai Nasdem	Pariaman II



12. Asman	609	PPP	Pariaman II
13. Riko Saputra Zein	893	Hanura	Pariaman II
14. Ali Bakri	927	Partai Golkar	Pariaman III
15. M. Taufik	973	Partai Nasdem	Pariaman III
16. Muhamad Yasin	771	PKS	Pariaman III
17. Mulyadi	776	PPP	Pariaman III
18. Ibnu Hajar	774	PAN	Pariaman III
19. Syafruddin	747	Partai Demokrat	Pariaman III
20. Romi Novialdi	989	PBB	Pariaman III

Sumber: Data sekunder Prima doni. 2019. Memiliki suara terbanyak Fitri Nora juga satu satunya Perempuan Anggota DPRD Pariaman terpilih. <https://covesia.com/archipelago/baca/79242/miliki-suara-terbanyak-fitri-nora-juga-satu-satunya-perempuan-anggota-dprd-pariaman-terpilih>.(diakses tanggal 16 Februari 2020).

Menariknya Fitri Nora yang merupakan satu-satunya perempuan di DPRD Kota Pariaman, juga menjadi Ketua DPRD Kota Pariaman pada periode 2019-2024. Berdasarkan hasil pemilu tahun 2019, Fitri Nora berhasil mendapatkan suara terbanyak dari 19 anggota DPRD lainnya yaitu sebanyak 1.178 suara. Pada tanggal 14 Agustus 2019 Fitri Nora resmi dilantik menjadi Ketua DPRD Kota Pariaman periode 2019-2024. Maka secara langsung Fitri Nora memimpin 19 anggota DPRD Kota Pariaman lainnya yang semuanya adalah laki-laki.

Pada periode sebelumnya 2014-2019 Fitri Nora merupakan anggota DPRD Kota Pariaman dan juga menjadi satu-satunya perempuan di DPRD tersebut. Berdasarkan perolehan suara pada periode 2014-2019 Fitri Nora berada pada urutan nomor dua terbanyak dengan memperoleh 1.142 suara.<sup>11</sup> Selain itu pada tahun 2018 Fitri Nora naik menjadi wakil DPRD Kota Pariaman yang

<sup>11</sup> Oyong Liza Piliang. 2014. Aman & Lancar KPU Kota Pariaman Tetapkan Hasil Pileg 2014, Partisipasi Pemilih Naik jadi 71,6 Persen. <http://www.pariamantoday.com/2014/04/aman-lancar-kpu-kota-pariaman-tetapkan.html?m=1>. ( diakses tanggal 20 agustus 2020)

menggantikan Wakil DPRD Kota Pariaman sebelumnya.<sup>12</sup> Pada periode sekarang pimpinan DPRD Kota Pariaman terdiri dari Fitri Nora sebagai ketua, Faisal dan Mulyadi sebagai wakil ketua, dapat dilihat pada gambar 1.1



Sumber: Dokumentasi pribadi

**Gambar 1.1**  
**Pamflet DPRD Kota Pariaman**

Meskipun Fitri Nora satu-satunya perempuan di DPRD Kota Pariaman, dan menjadi ketua untuk periode sekarang, Fitri Nora mengaku tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Hal ini disebabkan pengalaman Fitri Nora yang sudah lama di politik dan pada periode sebelumnya sudah berada di DPRD Kota Pariaman, jadi pengalaman pada periode sebelumnya sangat berguna untuk periode sekarang. Seperti yang diungkapkan oleh Fitri Nora dalam wawancara singkat, Fitri Nora mengatakan:<sup>13</sup>

“...Alhamdulillah tidak ada ya, karena sebelumnya inikan periode ke dua, sebagian kawan-kawan yang lama ada 12 orang kami yang duduk kembali. Artinya kita sudah saling mengenal dan kerjasama yang baik pada periode sebelumnya, dua tahun belakang saya juga wakil ketua DPRD. Apalagi kita di Pariaman, kita boleh dibilang homogen, sebenarnya kita sudah seperti keluarga besar, meskipun tidak hubungan

<sup>12</sup>Zulfikar. 2018. DPRD Pariaman Lantik Fitri Nora sebagai Pimpinan. <https://sumbar.antaranews.com/berita/228426/dprd-pariaman-lantik-fitri-nora-sebagai-pimpinan>. (diakses tanggal 20 Agustus 2020).

<sup>13</sup> Wawancara peneliti dengan Fitri Nora melalui telepon pada tanggal 3 Mei 2020.

ipar, besan, paling tidak ada hubungan pertemanan yang cukup lama. Alhamdulillah saya tidak mengalami kesulitan yang berarti selama menjadi ketua DPRD, meskipun satu-satunya perempuan di DPRD Kota Pariaman...”

Bagi Fitri Nora dunia politik bukan suatu hal yang asing lagi, karena sudah lama berkecimpung dalam dunia politik. Sebelum terjun dalam dunia politik Fitri Nora berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yaitu di ELPETIGA Padang pada tahun 2000-2004. Fitri Nora juga pernah menjadi ketua di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pariaman (P2TP2A) dan pendiri LSM Limpapeh.<sup>14</sup> Berdasarkan kutipan wawancara peneliti dengan Fitri Nora juga menjelaskan bahwa banyaknya *incumbent* di DPRD Kota Pariaman dan wilayah yang kecil serta masyarakat yang homogen membantu Fitri Nora untuk mudah menjalankan kepemimpinan.

Pada periode sebelumnya Fitri Nora berserta anggota DPRD Kota Pariaman lainnya menghasilkan 8 Perda Inisiatif dan 112 keputusan.<sup>15</sup> Pada masa Fitri Nora menjadi wakil DPRD Kota Pariaman tahun 2018-2019, mendukung penuh terhadap kebijakan dalam bidang kesehatan yaitu memberikan BPJS gratis. Hal ini berdasarkan wawancara peneliti dengan Fitri Nora yang mengatakan:<sup>16</sup>

“Kami di DPRD Kota Pariaman bersama Wali Kota Pariaman mengalokasikan dana sekitar 6 Milyar, untuk membayar dan menyediakan rakyat kita tidak mampu untuk mendapatkan BPJS atau mendapat jaminan kesehatan. Jadi setelah kita hitung di Kota Pariaman, ada 6000 KK yang benar-benar tidak masuk dalam jaminan kesehatan nasional, yang tidak dapat kartu KIS, tidak dapat kartu kesehatan dari Provinsi Sumatera Barat, nah jadi kita hitung ada 6000 KK masyarakat

<sup>14</sup> Harian Haluan. 2020. Ketua DPRD Kota Pariaman Fitri Nora Berkah Restu Suami dan Orang Tua.

<sup>15</sup> Eko Fajri. 2017. Walikota sebut Legislatif Periode 2014-2019 Paling Produktif Sejak Pariaman Sejak Otonom. <https://news.klikpositif.com/baca/55735/walikota-sebut-legislatif-periode-2014-2019-paling-produktif-sejak-pariaman-menjadi-daerah-otonom>. (diakses tanggal 18 Juni 2020)

<sup>16</sup> Wawancara peneliti dengan Fitri Nora melalui telepon pada tanggal 3 Mei 2020.

kurang mampu membayar BPJS. Nah itu kita anggarkan di DPRD bersama Wali Kota Pariaman untuk membayarkan masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan BPJS dengan anggaran per tahun lebih kurang 6 Milyar”

Fitri Nora menjelaskan bahwa DPRD dengan Wali Kota Pariaman telah menganggarkan dana sekitar 6 Milyar. Dana tersebut dianggarkan untuk memberikan BPJS gratis kepada masyarakat Kota Pariaman yang kurang mampu dan tidak mendapatkan jaminan kesehatan. BPJS gratis ini akan diberikan kepada 6000 KK. Pemberian BPJS gratis ini akan dianggarkan setiap tahunnya untuk 6000 KK.

Pada masa kepemimpinan Fitri Nora periode ini, baru memasuki 1 tahun. Salah satu bentuk kontribusi Fitri Nora dalam rangka menangani Covid-19 yaitu, membentuk Panitia Khusus (Pansus) sebagai respon dalam penanganan Covid-19. Pansus ini dibentuk untuk mengawasi kinerja eksekutif dalam rangka penanganan Covid-19, mengingat dana yang dianggarkan untuk Covid-19 cukup besar. Ketua dari Pansus percepatan penyampaian dana Covid-19 diamanahkan oleh Fitri Nora kepada Ibnu Hajar dari Fraksi PAN, ini juga sebagai bentuk tugas DPRD mengawasi kinerja eksekutif.<sup>17</sup>

Selain itu pada masa kepemimpinan Fitri Nora juga mendorong anggaran yang berbasis gender. Salah satu contohnya dalam bidang pendidikan pada tahun 2019 anggaran untuk pendidikan yang terealisasi Rp.1.210.800.000, sedangkan pada tahun 2020, masa kepemimpinan Fitri Nora menganggarkan

---

<sup>17</sup>Tabloidbijak.com. 2020. Ketua DPRD Fitri Nora Sesalkan Walikota Pariaman Jalan Sendiri dalam Penanganan Covid-19. <https://tabloidbijak.com/index.php/2020/05/16/ketua-dprd-fitri-nora-sesalkan-walikota-pariaman-jalan-sendiri-dalam-penanganan-covid-19/>. (diakses 8 September 2020).

Rp.3.446.400.000.<sup>18</sup> Peningkatan anggaran berbasis gender seperti bidang kesehatan dan pendidikan didukung oleh Fitri Nora. Hal ini bertujuan agar meningkat kesejahteraan masyarakat Kota Pariaman khususnya kaum ibu dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan ini merupakan salah satu alasan Fitri Nora masuk ke dalam dunia politik, Fitri Nora mengatakan:<sup>19</sup>

“ ...Saya berasal dari NGO, dan saya sudah terbiasa bersama masyarakat, motivasi paling penting adalah ketika kami di NGO apalagi dalam pendampingan kasus-kasus perempuan. Adanya kesulitan ketika berhadapan dengan mengambil kebijakan. Jadi kawan-kawan NGO adanya kesulitan dalam kebijakan bidang kesehatan, pendidikan, pendampingan di bidang dalam pengadilan. Maka timbul inisiatif mengapa tidak masuk ke dalam sistem untuk ikut mengambil suatu kebijakan. Artinya kesulitan kami selama ini dalam menghadapi dan membantu masyarakat yang marginal dan masyarakat bawah pada umumnya bisa kita atasi apabila masuk ke dalam. Inilah motivasi saya masuk ke dalam dunia politik...”

Pernyataan Fitri Nora di atas menjelaskan bahwa alasan Fitri Nora masuk dalam dunia politik yaitu ingin berperan dalam mengambil kebijakan untuk menyelesaikan masalah perempuan, seperti masalah pendidikan, kesehatan, kekerasan perempuan. Maka dari itu Fitri Nora sangat mendorong peningkatan anggaran berbasis gender pada masa kepemimpinannya. Selain itu program-program yang dibentuk oleh eksekutif di masa kepemimpinan Fitri Nora ini, telah membantu Fitri Nora untuk mewujudkan keinginannya ketika masuk politik. Diantara program eksekutif yaitu kesehatan gratis, SMA/SMK gratis, dan program pendidikan satu rumah satu sarjana.

---

<sup>18</sup>Juned. 2019. Lanjutkan Bantuan Keuangan Khusus, Tahun 2020 Pemko Pariaman Anggarkan 3,2 M untuk Siswa SMA/SMK. <https://pariamankota.go.id/berita/lanjutkan-bantuan-keuangan-khusus-untuk-smasmk>. (diakses tanggal 18 Juni 2020)

<sup>19</sup> Wawancara peneliti dengan Fitri Nora melalui telepon pada tanggal 3 Mei 2020.

Berdasarkan data yang telah peneliti jabarkan sebelumnya, maka peneliti berasumsi bahwa Fitri Nora sebagai Ketua DPRD Kota Pariaman dapat menjalankan fungsi kepemimpinannya, meskipun satu-satunya perempuan di DPRD Kota Pariaman. Hal ini juga didukung adanya peningkatan kepercayaan masyarakat kepada Fitri Nora, yang dapat dilihat dari perolehan suara Fitri Nora dari periode ke periode selalu meningkat. Artinya Fitri Nora dapat menjalankan fungsi kepemimpinannya khususnya kepada masyarakat.

Namun perlu melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi tentang Fitri Nora dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya sebagai Ketua DPRD Kota Pariaman periode 2019-2024 di tengah mayoritas laki-laki. Satu-satunya perempuan dan berperan sebagai pemimpin di antara mayoritas laki-laki merupakan tantangan tersendiri bagi Fitri Nora untuk menjalankan fungsi kepemimpinan, karena lembaga legislatif bersifat kolektif kolegial yang berbeda dibandingkan organisasi lainnya. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang dijadikan bahasan dalam penelitian ini yaitu:

“Bagaimanakah Fitri Nora melaksanakan fungsi kepemimpinan di tengah kuatnya dominasi laki-laki di lembaga tersebut?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang dan rumusan masalah serta pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengidentifikasi fungsi kepemimpinan yang dijalankan oleh Fitri Nora sebagai Ketua DPRD Kota Pariaman di tengah dominasi laki-laki. Selain itu untuk

menjelaskan cara Fitri Nora menjalankan fungsi kepemimpinannya sebagai Ketua DPRD Kota Pariaman di tengah dominasi laki-laki. Fungsi kepemimpinan yang dimaksud adalah fungsi kepemimpinan Sondang P Siagian.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Manfaat penelitian ini secara akademis yaitu dapat menjadi rujukan bagi pembaca dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang fungsi kepemimpinan agar perempuan menjadi pemimpin yang efektif dalam dunia politik. Penelitian ini nantinya akan membahas fungsi kepemimpinan menurut Sondang Siagian terdapat lima fungsi kepemimpinan yaitu pimpinan sebagai penentu arah, pimpinan sebagai wakil dan juru bicara, pimpinan sebagai komunikator yang efektif, pimpinan sebagai mediator, dan pimpinan sebagai integrator.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan memperluas wawasan mengenai kepemimpinan politik perempuan khususnya tentang fungsi kepemimpinan. Serta dapat menjadi acuan bagi perempuan agar lebih bisa meningkatkan partisipasinya dalam dunia politik untuk ke depannya.

